

**5 Provinsi dengan
Kuota Terbanyak 2026**

Jawa Timur

42,409



Jawa Tengah

34,122



Jawa Barat

29,643



Sulawesi Selatan

9,670



Banten

9,124

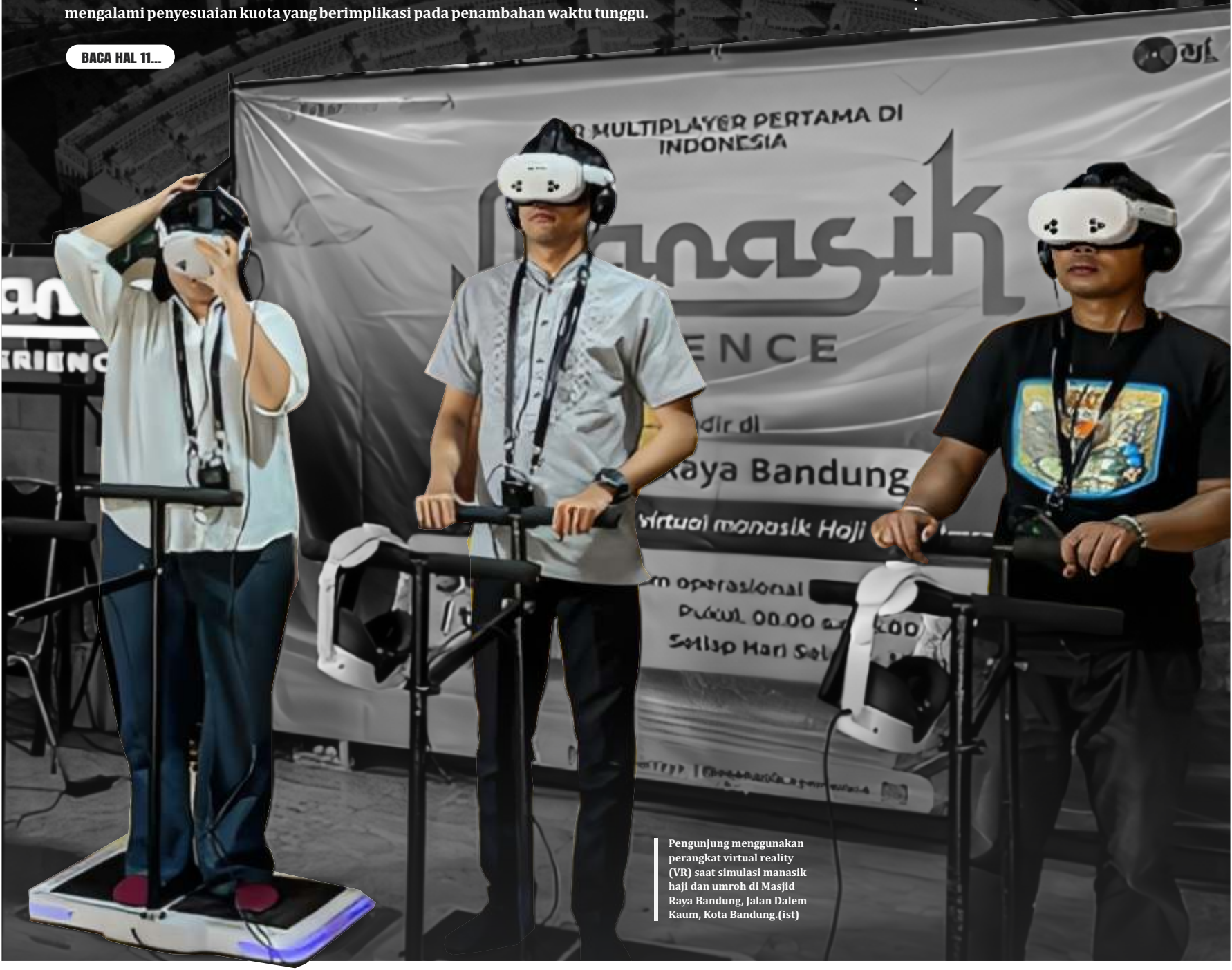
RESAH HATI CALON JAMAAH AKIBAT REDISTRIBUSI KUOTA HAJI

Kurang dari setengah tahun dari jadwal keberangkatan haji 2026, keresahan hati para calon jamaah mulai mencuat. Kebijakan redistribusi kuota haji nasional tahun ini memang berdampak signifikan di sejumlah daerah. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya berpotensi membuat calon jamaah yang telah menunggu lebih dari satu dekade terancam kembali tertunda keberangkatannya. Tak hanya menyebabkan kerugian materil, pemerintah diingatkan akan dampak terhadap psikologis masyarakat. Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf bersikukuh bahwa pembagian kuota haji reguler 1447 H/2026 M antarprovinsi mengikuti prinsip keadilan dan proporsionalitas. Pemerintah memilih pendekatan waiting list. Hasilnya, menyamaratakan rata-rata masa tunggu haji nasional menjadi sekitar 26 tahun. Melalui skema perhitungan baru ini, 10 provinsi akan mengalami penambahan kuota yang berdampak pada pemendekan masa tunggu. Sementara 20 provinsi lainnya akan mengalami penyesuaian kuota yang berimplikasi pada penambahan waktu tunggu.

BACA HAL 11...

**Jadwal Lengkap
Penyelenggaraan Haji 2026**

- Asrama Haji: Mulai 21 April 2026
- Gelombang I Pemberangkatan: 22 April 2026 ke Madinah
- Gelombang II Pemberangkatan: 7 Mei 2026 ke Jeddah
- Penutupan Penerbangan Haji di Jeddah: 21 Mei 2026
- Puncak Ibadah Haji: 26 Mei 2026 (menunggu konfirmasi)
- Pemulangan Gelombang I: 1 Juni 2026 dari Jeddah
- Pemulangan Gelombang II: 16 Juni 2026 dari Madinah
- Penutupan Pemulangan: 1 Juli 2026



Pengunjung menggunakan perangkat virtual reality (VR) saat simulasi manasik haji dan umroh di Masjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung. (ist)

CATAT! KUR SAMPAI RP 100 JUTA TANPA AGUNAN

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon sampai Rp 100 juta tidak memakai agunan. Tak hanya itu, di tahun 2026 masyarakat tak akan dibatasi dalam mengajukan pinjaman kredit jenis ini. Suku bunga yang ditawarkan pun akan flat sebesar 6%. Semua kemudahan aturan itu akan resmi diterapkan per Januari tahun depan.

Penegasan ini menjawab keluhan sejumlah anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) soal permintaan jaminan oleh oknum bank penyalur KUR.

"Saya tegaskan sekali lagi ya, pengajuan KUR dari Rp 1 juta- Rp 100 juta tanpa agunan sama sekali," ujar Maman usai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan KUR di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Maman mengakui masih ada beberapa kasus permintaan agunan oleh oknum petugas di lapangan. Ia menekankan aturan pemerintah sangat jelas dan tidak memberikan ruang bagi praktik tersebut.

"Bahwa memang masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kejadian yang mungkin oknum-oknum di lapangan masih meminta agunan, memang kita harus akui masih ada. Tetapi yang harus dipahami bahwa tegas kok secara aturan," tuturnya.

Maman meminta masyarakat maupun para pemangku kepentingan termasuk DPR/DPD untuk melapor jika menemukan pelanggaran. Pemerintah, menurutnya, siap menindak tegas bank penyalur yang terbukti melanggar aturan.

"Kalau memang ternyata masih ada laporan, silakan berikan laporan resmi pada kami. Kami pasti akan tindak lanjut dan akan berikan sanksi. Sanksinya itu tidak dibayarkan subsidi KUR-nya kepada bank terkait. Itu tegas sekali," tegas Maman.

Dia mengatakan sudah ada beberapa bank yang dikenakan sanksi atas praktik tersebut. "Banyak, sudah ada beberapa kok," ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan dan memudahkan masyarakat melapor, Kementerian UMKM akan meluncurkan sistem pelaporan terintegrasi bernama Sapa UMKM pada Desember 2025. Platform ini dirancang agar pelaku UMKM di seluruh Indonesia dapat menyampaikan pengaduan terkait KUR secara mudah dan terpusat.

"Nanti semuanya itu akan kita full di situ. Jadi laporan-laporan dari saudara-saudara kita, usaha mikro,



kecil, menengah, itu kita akan full-kan semua laporannya di situ. Jadi terintegrasi semua," jelas Maman.

Selama ini laporan masih bersifat konvensional dan menyulitkan pelaku UMKM di wilayah terpencil. Melalui Sapa UMKM, pemerintah

berharap seluruh laporan dapat tercatat secara real time dan langsung ditindaklanjuti.

"Saya mohon maaf kepada publik, ini baru terealisasi Desember. Jadi Insya Allah nanti setelah Desember, semuanya, saudara-saudara kita yang

Pemerintah Alokasikan Rp130 T untuk KUR Sektor Perumahan

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp130 triliun untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan. Alokasi KUR ini, di luar anggaran yang sudah disediakan pemerintah sekitar Rp300 triliun untuk UMKM.

"Angka Rp300 triliun itu tidak termasuk Rp130 triliun yang (KUR sektor) perumahan," ujar dia, kepada awak media, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Pada tahap awal, Airlangga berharap bank dapat menyalurkan KUR perumahan ke UMKM yang bergerak di sektor usaha perumahan senilai Rp28 triliun pada kuartal I 2026.

Sementara itu, seiring dengan alokasi dana KUR khusus untuk sektor perumahan, aturan terkait penjaminan kredit UMKM perumahan akan diatur lebih lanjut oleh PT Asuransi Kredit Indonesia

(Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) bersama perbankan.

"Kemudian juga kami dorong untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penjaminan KUR, baik itu oleh Askrindo, Jamkrindo, itu mereka minta untuk setiap program, ada perbedaan fee-nya, itu untuk dibahas secara business to business antara perbankan dengan Jamkrindo, Askrindo," lanjut Airlangga.

Karenanya, pemerintah meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Badan Pengaturan (BP) BUMN untuk memfasilitasi pembahasan biaya penjaminan antara Askrindo, Jamkrindo dan perbankan.

"Pembahasan tersebut tentu kami minta dipayungi oleh Dandangkara dan BP BUMN," tutur Airlangga.

Sebelumnya Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa pada tahun depan pemerintah telah menyediakan plafon untuk

ada di ujung sana, dia akan bisa lapor ke Sapa UMKM," ujar Maman.

Di tahun 2026 masyarakat juga tak akan dibatasi dalam mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kata Maman, pemerintah saat ini tengah menyiapkan peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian untuk mengatur hal tersebut. Kebijakan ini, sebut Maman, akan mulai diterapkan per Januari 2026 mendatang. (blo,tin,ist/dya)

REALISASI KUR 2025

1. Capaian Penyaluran KUR 2025

-Realisasi hingga 15 November 2025:
Rp 238,7 triliun Setara 83% dari target nasional Rp 286,61 triliun

2. Penyaluran ke Sektor Produksi

-Disalurkan: Rp 144,9 triliun
-Porsi: 60,7% dari total KUR
Pertama kalinya menembus target pemerintah (60%) sejak 2020
-Prediksi akhir tahun: 61%

3. Jumlah Debitur

-Total penerima KUR: 4,04 juta debitur
-Debitur baru: 2,25 juta (96% dari target 2,34 juta)
-Debitur graduasi: 1,3 juta (112% dari target 1,2 juta)

ATURAN BARU KUR 2026

1. Bunga KUR 2026

Bunga flat 6% untuk seluruh skema KUR

2. Batas Pengajuan Dihapus

Tidak ada batas frekuensi pengajuan UMKM dapat mengajukan KUR lebih dari sekali selama lolos kelayakan

3. Tanpa Agunan hingga Rp 100 juta

Pinjaman KUR sampai Rp 100 juta tidak memerlukan agunan tambahan
Di atas Rp 100 juta, bank dapat meminta jaminan sesuai penilaian risiko

4. Target Penyaluran

Total target penyaluran KUR 2026: Rp 320 triliun

5. Porsi Sektor Produksi

Porsi pembiayaan ke sektor produksi ditingkatkan menjadi 65%



penyaluran KUR sebesar Rp320 triliun. Dari total target tersebut, 65 persen dialokasikan ke sektor produksi.

"Saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu, yang dialokasikan ke sektor produksi 65 persen. Jadi, penugasan dari komite naik sekitar 5 persen," ungkapnya, kepada awak media. (wid,tir,ist/dya)

DPR TETAP SAHKAN RKUHAP SAAT GELOMBANG KRITIK MENGUAT

Meskipun gelombang kritik terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) terus menguat, DPR tetap berencana mengesahkan regulasi tersebut dalam rapat paripurna pada Selasa (18/11/2025). Pihak yang merasa dirugikan diarahkan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, Senin (17/11/2025) Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP melaporkan 11 anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHAP dari unsur DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pelaporan dilakukan karena proses pembahasan dinilai tidak membuka partisipasi publik secara bermakna.

Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi mengadukan Hakim Konstitusi Arsul Sani ke Bareskrim Polri. Pengaduan itu terkait legalitas ijazah program doktor Arsul Sani yang diduga palsu.

"Saya, dan kami di MKMK, merasa agak ganjil mengapa tiba-tiba ke Bareskrim? Pak Arsul itu hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Maka, kalau terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu, secara tidak langsung berarti para pelapor meragukan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR. Begitu bukan?" kata Palguna, Minggu (16/11/2025).

Palguna merujuk pada Undang-Undang MK yang menegaskan proses seleksi hakim konstitusi sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga penyalon, termasuk DPR.

Karenanya, kata Palguna, seharusnya tuduhan soal ijazah palsu Arsul itu lebih dulu ditanyakan ke DPR.

"Karena itu, logisnya, tanya ke DPR dulu dong. Ingat, Pasal 20 UU MK menyatakan, hakim konstitusi dipilih secara objektif, transparan, dan akuntabel dan mekanisme pemilihannya diserahkan kepada masing-masing lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mencalonkan hakim konstitusi (DPR, Presiden, MA)," ucap dia.

Palguna mengungkap, MKMK sebenarnya telah memantau dan mendalami isu yang beredar mengenai hakim Arsul Sani sejak hampir sebulan terakhir. Namun proses tersebut harus berjalan tertutup untuk melindungi pihak yang bersangkutan.

Dia membeberkan MKMK sudah hampir sebulan mendalami isu yang berkembang terkait tuduhan ke hakim Arsul Sani.

Namun, Palguna menyebut proses yang dilakukan MKMK belum bisa disampaikan kepada publik untuk menjaga pihak terkait tak diadili pada isu yang belum jelas kebenarannya.

"Dalam kaitan dengan MKMK, sejak isu ini muncul kurang lebih sebulan yang lalu, kami di MKMK sudah mendalaminya. Sebab, tugas MKMK bukan hanya menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, tetapi juga menjaga martabat dan kehormatan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP akan melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisi III DPR RI kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait proses pembahasan RUU KUHP. (Ist)



hakim konstitusi," tutur Palguna.

"Perihal sudah sampai di mana kami bekerja, mohon maaf, hal itu belum dapat kami sebutkan saat ini. Selain karena memang (menurut PMK) hal itu mesti dikerjakan secara tertutup, juga agar hakim konstitusi yang bersangkutan tidak 'diadili' oleh soal

atau isu yang belum jelas," sambungnya.

Sementara itu, Arsul Sani memilih untuk tidak memberikan komentar panjang terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Hakim konstitusi ini mempersilakan MKMK yang menangani persoalan tersebut. (gus,ist,rls/dya)

YLBHI: Kewenangan Polisi Justru Diperluas

WAKIL Ketua YLBHI, Arif Maulana, menyatakan draf revisi KUHP justru memperbesar kewenangan kepolisian. Padahal, tuntutan reformasi Polri selama ini mengarah pada pembatasan kekuasaan dan penguatan mekanisme pengawasan.

Menurut Arif, penyiksaan, salah tangkap, dan rekayasa kasus masih menjadi persoalan yang kerap terjadi. Bila revisi KUHP memperluas diskresi Polri, ia menilai hal tersebut akan berlawanan dengan semangat reformasi.

"Seharusnya yang dilakukan pemerintah dan DPR adalah membatasi kewenangan kepolisian, memperkuat pengawasan kepolisian, bukan justru menambah kewenangan kepolisian dan memperlemah pengawasan," ujarnya.

Ia juga mengkritik ketentuan yang tetap menempatkan Polri sebagai penyidik utama, termasuk

pengaturan pangkat, pendidikan, dan sertifikasi penyidik yang seluruhnya berada di bawah kendali internal Polri.

Arif menambahkan, ketidakharmonisan antara RUU KUHP dan regulasi terkait pelanggaran HAM berat dapat mengurangi peran Komnas HAM dalam proses penyelidikan kasus tertentu.

Berdasarkan berbagai catatan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan somasi terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Koalisi menilai proses legislasi kali ini sarat manipulasi dan tidak menghadirkan partisipasi publik yang bermakna.

Mereka juga menyampaikan lima tuntutan, termasuk permintaan kepada Presiden untuk menarik draf revisi KUHP, serta meminta DPR membuka seluruh dokumen pembahasan, khususnya hasil Panitia

DRAF RUU KUHP YANG DINILAI MASIH BERMASALAH

- PASAL 16**
"Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara: a. pengolahan tempat kejadian perkara; b. pengamatan; c. wawancara; d. pembuntutan; e. penyamaran; f. pembelian terselubung; g. penyerahan di bawah pengawasan; h. pelacakan; i. penelitian dan analisis dokumen; j. mendatangi atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan; dan/atau k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 16 ayat (1) RUU KUHP.
- PASAL 5**
"Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa: a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; b. pemeriksaan dan penyitaan surat; c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang; dan d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik," demikian bunyi Pasal 5 ayat (2) RUU KUHP.
- PASAL 90 DAN 93**
Koalisi ini kemudian menyoroti Pasal 90 dan 93 RUU KUHP. Pasal 90 menyatakan, penangkapan dilakukan paling lama 1x24 jam, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sementara itu, Pasal 93 ayat (1) menyebutkan bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- PASAL 105, 112A, 132A, DAN PASAL 124**
"Semua bisa kena geledah, sita, sadap, blokir menurut subyektivitas aparat tanpa izin hakim," kata koalisi tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP menyebut, upaya paksa yang dilakukan tanpa izin pengadilan itu tertuang dalam Pasal 105, 112A, dan 132A. Sementara Pasal 2RUU4 mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan tanpa izin hakim berlandaskan undang-undang yang bahkan belum terbentuk.
- PASAL 74**
"Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan pada tahap: a. penyelidikan; b. penyidikan; c. penuntutan; dan d. pemeriksaan di sidang pengadilan," bunyi Pasal 74 ayat (2).
- PASAL 7 DAN 8**
"PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri," bunyi Pasal 7 ayat (3) RUU KUHP. Sementara Pasal 8 ayat (3) mengatur, penyerahan berkas perkara oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- PASAL 137**
"Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan," demikian bunti Pasal 137A ayat (1).

Kerja per 13 November 2025.

Koalisi menegaskan bahwa alasan kebutuhan pemberlakuan KUHP baru pada 2026 tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mempercepat pengesahan KUHP tanpa proses deliberatif yang memadai.

Sementara, LBH Jakarta menyatakan akan melaporkan anggota Komisi III DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik selama pembahasan RUU KUHP.

Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menyebut proses revisi penuh dengan pelanggaran hukum, mulai dari dugaan pengabaian prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan hingga minimnya pelibatan publik. (ist,kcm/dya)

Soal Kasus Bullying di Sekolah

PRABOWO: HARUS KITA ATASI

Presiden Prabowo Subianto mengatakan kasus perundungan atau bullying di sekolah harus diatasi. Hal ini dilontarkan untuk menanggapi sejumlah kasus perundungan di tingkat sekolah yang belakangan terjadi. Namun, Kepala Negara tidak menjelaskan mengenai langkah konkret yang bakal dilakukan Kabinet Merah Putih untuk mengatasi hal tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap meningkatnya kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Ia juga menginstruksikan para pembantunya untuk segera menangani masalah ini.

"Ya itu harus kita atasi ya," ungkap Prabowo setelah meresmikan program digitalisasi pembelajaran di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari Senin (17/11/2025).

Terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan melakukan revisi terhadap peraturan menteri mengenai penanganan tindakan perundungan atau kekerasan di sekolah. Mu'ti tak menjelaskan mengenai beleid yang dimaksud, tetapi aturan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Tak hanya itu, Mu'ti mengatakan akan membentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dan melibatkan orang tua, murid dan masyarakat sehingga harapannya tindakan kekerasan di sekolah tidak terulang lagi di masa mendatang.

"Kalau penanganan nanti ada peraturan menteri pendidikan dasar dan menengah untuk memperbaiki permen sebelumnya nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan lebih humanis, komprehensif dan partisipatif," ujar Mu'ti.

Namun, Mu'ti mengatakan belum mendapatkan laporan secara keseluruhan mengenai aksi perundungan yang diduga terjadi di SMPN 19 Tangerang Selatan.

Belakangan, salah satu dugaan perundungan di sekolah yang menjadi sorotan adalah yang terjadi di SMPN 19 Tangerang Selatan. Hal ini menjadi sorotan usai salah satu siswa kelas I SMPN 19 Tangerang Selatan yang diduga menjadi korban perundungan dilaporkan meninggal dunia di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (16/11/2025) pagi.

DPR Singgung Psikolog di Sekolah

Tragedi ini memantik perhatian publik sekaligus menimbulkan keprihatinan mendalam dari Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.



Presiden Prabowo Subianto di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat mengecek penggunaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard Senin (17/11/2025). (ist)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa lingkungan pendidikan masih jauh dari kata aman bagi peserta didik.

Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi ruang yang memberikan perlindungan, bukan justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan.

"Kekerasan di satuan pendidikan, termasuk yang terbaru di SMPN 19

Tangerang Selatan, menunjukkan bahwa sekolah masih menghadapi persoalan serius dalam menciptakan ruang aman bagi peserta didik," ujar Lalu saat dihubungi, Senin (17/11/2025).

Ia menilai bahwa insiden perundungan yang terus berulang di berbagai daerah harus segera ditangani secara sistematis.

Salah satu langkah mendesak

adalah penerapan penuh Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Regulasi tersebut telah mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, hingga pendampingan terhadap korban kekerasan.

Selain itu, Lalu mengusulkan pembentukan tim khusus di setiap satuan pendidikan.

Tim tersebut akan bertugas memastikan keamanan lingkungan belajar, menangani kasus kekerasan, serta menciptakan sistem sekolah yang inklusif dan responsif terhadap potensi perundungan.

"Langkah utamanya adalah memastikan bahwa setiap satuan pendidikan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas keamanan dan inklusivitas lingkungan belajar (PPK)," tegasnya.

Lalu menjelaskan bahwa tim khusus ini harus terdiri dari tenaga profesional, termasuk psikolog dan konselor. Kehadiran psikolog dinilai penting untuk membantu memulihkan kondisi korban sekaligus menyusun kajian pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Menurutnya, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas tim ini. Anggaran tersebut diperlukan untuk pelatihan guru dalam mendeteksi tanda-tanda kekerasan sejak dini serta menjalankan program pencegahan yang berkelanjutan. (gus,ist,rls/dya)

Rekam Medis Korban Dicek, Guru Diperiksa

POLISI masih mendalami kematian MH (13), pelajar yang diduga menjadi korban perundungan atau bullying di SMPN 19 Tangerang Selatan (Tangsel). Diketahui, korban meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang mengatakan rekam medis ini dibutuhkan untuk mengetahui riwayat kesehatan korban. Sehingga, bisa diketahui apakah korban sebelumnya sudah memiliki penyakit bawaan.

"Sampai saat ini kami masih mendalami dulu dari tim kedokteran, tim rumah sakit yang menangani," kata Victor kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Dia menerangkan pihak penyelidik juga sudah berkoordinasi dengan dokter untuk meminta rekam medik tersebut. Selain itu, Victor juga sudah menemui orang tua korban secara langsung.

Sejauh ini, lanjut dia, sudah dilakukan pemeriksaan kepada enam orang saksi. Selanjutnya,

pemeriksaan kepada orang tua korban akan dilakukan jika kondisinya sudah memungkinkan.

"Sebelumnya dari penyidik sudah beberapa kali bertemu, namun kita masih berempati waktu itu saat almarhum masih hidup. Itu masih fokus orang tuanya untuk memberikan pengobatan. Kemarin saat kami melayat, bercakap-cakap dengan pihak keluarga, dalam waktu dekat pihak keluarga akan kita layani untuk kita mintai informasi," ujar dia.

Dia menambahkan, koordinasi dengan sejumlah instansi terkait juga sudah dilakukan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan sudah turun langsung untuk mengasistensi kasus ini.

Sebelumnya, kasus dugaan perundungan atau bullying menimpa seorang siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Korban MH bahkan sudah turun langsung untuk mengasistensi kasus ini.

Berdasarkan penuturan korban, dirinya dipukul menggunakan kursi pada bagian belakang kepalanya.

Luka lebam di wajah dan kepala korban terlihat jelas dari foto-foto yang beredar.

Kejadian tersebut viral di media sosial Instagram @seputartangsel. Akun tersebut menampilkan kiriman dari kakak korban yang menyatakan adiknya menjadi korban perundungan di SMPN 19 Tangsel pada 20 Oktober 2025.

Dalam unggahan tersebut disebutkan bagian kepala korban dipukul menggunakan kursi sekolah besi. Korban baru melaporkan ke keluarga sehari setelah kejadian karena tidak kuat menahan sakit di kepalanya. Kondisi korban sempat sangat memprihatinkan dengan gejala tidak bisa berjalan, seluruh tubuh lemas, mata rabun, sering pingsan, dan tidak mau makan.

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie buka suara soal kasus bullying berujung siswa tewas di SMPN 19. Benyamin mengatakan pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian. Ia menyebut polisi tengah menyelidiki kasus tersebut. (ist,tang/dya)

PT Pertamina Patra Niaga menyebut sebanyak 394.000 nomor polisi telah diblokir karena teridentifikasi fraud atau curang dalam hal pembelian solar dan Peralite. Kini ratusan kendaraan tersebut tak dapat membeli BBM bersubsidi.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan bahwa langkah pemblokiran ini dilakukan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran tidak disalahgunakan. Adapun untuk memastikan BBM tepat sasaran, Pertamina telah menerapkan sistem QR Code dalam pembelian BBM subsidi.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga melakukan pembinaan terhadap 544 SPBU sepanjang tahun 2025.

"Sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nopol kendaraan yang telah kita blokir untukantisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU," katanya dalam RDP dengan Komisi XII DPR, Senin (17/11/2025).

Mars Ega menambahkan sistem penggunaan sistem QR code dalam pembelian BBM subsidi ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam pengendalian BBM. Di mana hingga Oktober 2025 telah terjadi penurunan konsumsi solar dan pertalite.

"Untuk memastikan penyaluran BBM jenis GPT solar maupun GPT pertalite saat ini sudah mendapatkan hasil, dimana kuota solar sampai dengan Oktober 2025 diperkirakan under 10% dari kuota yang ditetapkan pemerintah," katanya.

"Untuk Peralite, realisasi kuota diperkirakan lebih rendah sekitar 10% dari target 2025," tambahnya.

Sebelumnya Pertamina Patra Niaga menegaskan pembelian BBM subsidi jenis solar subsidi dan Peralite sepenuhnya wajib menggunakan QR Code. Tujuannya agar penyaluran subsidi negara melalui BBM bisa lebih tepat sasaran.

Langkah tersebut menjadi bagian dari program subsidi tepat yang terus didorong sepanjang tahun 2025, terutama untuk memastikan penyaluran bahan bakar subsidi tetap tepat sasaran dan terpantau secara digital. Ega menegaskan bahwa penerapan sistem digital ini sudah berjalan sepenuhnya di seluruh SPBU.

Penggunaan QR Code langsung berdampak pada pengendalian kuota. Hingga Oktober 2025, penurunan konsumsi Peralite hingga 10 persen dan Solar Subsidi turun sekitar 1,5 persen dari kuota 2025.

Sanksi SPBU di Lamtim

Sementara, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menemukan pelanggaran oleh salah satu lembaga penyalur di wilayah Lampung Timur.

Area Manager Communication,

TERDETEKSI CURANG, 394 RIBU KENDARAAN TAK BISA BELI BBM SUBSIDI LAGI

Pertamina Patra Niaga telah memblokir 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan lantaran melakukan aktivitas mencurigakan dalam pembelian Solar dan Peralite. Alhasil, kendaraan tersebut tidak lagi bisa melakukan transaksi BBM bersubsidi.

Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh SPBU untuk mematuhi aturan dan regulasi terkait penyaluran BBM subsidi. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk penyimpangan akan langsung ditindak.

"Pertamina telah melakukan pengecekan lapangan dan langsung memberikan sanksi tegas kepada SPBU 24.341.128 di Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur karena melakukan penyalahgunaan BBM jenis Biosolar.

Sanksi yang diberikan berupa pembinaan serta penghentian penyaluran BBM jenis Biosolar dan Peralite selama 30 hari," tegas Rusminto, Senin (17/11/2025).

Ia menambahkan, Pertamina tidak akan ragu memberikan tindakan tegas terhadap lembaga penyalur yang terbukti melanggar ketentuan. "Langkah ini diambil sebagai efek jera agar seluruh SPBU mematuhi ketentuan penyaluran BBM subsidi," ujarnya.

Meski penyaluran BBM di SPBU tersebut dihentikan sementara, Pertamina memastikan pasokan bagi

masyarakat tetap aman. Warga masih dapat memperoleh BBM di SPBU 24.341.13 yang berjarak sekitar 2,2 kilometer dari lokasi SPBU yang dikenai sanksi.

Pertamina juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin. (wid,ist,ant/dya)



Stok BBM BP-AKR Mulai Habis, Tersisa 9 SPBU

STOK bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP-AKR mulai menipis.

Menurut catatan BP-AKR, dari 51 SPBU di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, tersisa 9 SPBU yang masih menyimpan stok BBM RON 92.

Berdasarkan keterangan dari laman resmi BP-AKR, hanya 3 jaringan SPBU yang tersedia BP 92 di Jakarta. Selanjutnya, terdapat 1 SPBU di wilayah Bogor yang menjual BBM RON 92.

Sementara itu, BP-AKR melaporkan terdapat 2 SPBU di Tangerang yang masih menjual BBM RON 92.

Adapun, BP-AKR memastikan terdapat 3 SPBU yang masih menjual BP 92 di wilayah Bekasi. Hanya saja, stok BBM RON 92 telah habis untuk wilayah Depok.

Sebelumnya, manajemen BP-AKR telah mengisi stok BBM di jaringan SPBU mereka akhir Oktober 2025, usai kehabisan stok sejak akhir Agustus 2025.

Belakangan, 51 SPBU BP-AKR di Jabodetabek kembali beroperasi setelah pengisian ulang stok bahan bakar. Antara lain; 21 SPBU di Jakarta, 7 SPBU di Bogor, 5 SPBU di Depok, 12 SPBU di Tangerang, dan 6 SPBU di Bekasi.

Tambah Pasokan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mensinyalir PT Aneka Petroindo Raya (operator SPBU BP-AKR) bakal menambah sekitar 100.000 barel BBM dasar atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan BP-

BESARAN SUBSIDI BBM DALAM APBN (RP TRILIUN)

2023	21.3
2024	26.7
2025	26.7

Besaran subsidi BBM oleh pemerintah tumbuh 11,96% (CAGR).

AKR sebelumnya telah membeli base fuel sebanyak 100.000 barel.

Kemudian, perseroan kembali melakukan pemesanan kargo kedua yang akan datang pada pekan ketiga November 2025.

"BP-AKR kemarin sudah dua kali pesan [masing-masing] 100.000 barel, dua kargo. Dan kami dengar-dengar akan ada lagi kargo ketiga," kata Laode ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (12/11/2025) petang.

Akan tetapi, Laode belum bisa memastikan waktu pemesanan kargo ketiga dari BP-AKR tersebut.

"Kita doakan ya. Semoga yang ketiga disetujui juga. Saya belum tahu [pastinya kapan]. Ini kan baru indikasi. Indikasi yang bagus," ujarnya.

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan pihaknya siap memenuhi permintaan pembelian BBM tersebut berapapun jumlah permintaan dari SPBU swasta. (wid,blo,ktn/dya)

Metode Landfill Mining Mulai Diterapkan di TPA Paras, Hasilkan 200 RDF/Hari

Bupati Malang, Sanusi, meninjau TPA Paras. (dok. Prokopim Kab Malang)



Paras telah menunjukkan kapasitas produksi yang signifikan, sekitar 200 ton refuse derived fuel (RDF) per hari.

Bupati Malang, Sanusi, mengatakan melalui metode ini, sampah lama akan dipilah dan diolah menjadi bahan bakar alternatif. Sehingga pengelolaan sampah tidak hanya lebih efektif, tetapi juga memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.

MALANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mulai menerapkan metode landfill mining di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Paras. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pengurangan timbunan sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.

Meski baru dioperasikan, pengolahan landfill mining di TPA

"Penerapan metode landfill mining ini sebagai salah satu solusi modern dalam pengelolaan sampah. Jadi sampah-sampah yang lama, itu dipilah, diolah, dan dimanfaatkan kembali menjadi bahan bakar alternatif untuk industri semen, khususnya dalam bentuk RDF," ujar Sanusi, dikutip pada Senin (17/11/2025).

Ditegaskannya, pendekatan tersebut tidak hanya menyasar penanganan residu sampah, tetapi juga berfungsi sebagai langkah optimalisasi TPA yang selama ini mengalami beban penumpukan.

Menurut Sanusi, seluruh sampah lama di TPA Paras digali dan dimasukkan ke dalam dua jenis mesin pemilah yang digunakan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Setelah melalui proses pemilahan, material yang tersisa dilembutkan hingga mencapai standar RDF.

"Hasil inilah yang menjadikan sampah siap untuk dikirim ke PT Semen Indonesia," jelasnya.

Kerja sama antara Pemkab Malang dan PT Semen Indonesia, disebutkan menjadi aspek penting dalam implementasi program tersebut. Sanusi menyampaikan, perusahaan semen itu akan membeli RDF dari TPA Paras dengan harga Rp400 ribu per ton.

Kemitraan ini, menurutnya, tidak hanya memastikan pemanfaatan akhir RDF, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan daerah. "Penghasilan

dari pengolahan sampah ini akan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang," kata Sanusi.

Ia menilai model pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi seperti ini perlu diperluas agar menjadi bagian dari strategi pengurangan ketergantungan TPA terhadap sistem penimbunan.

Ke depan, target produksi bulanan ditetapkan mencapai 2.000 ton untuk mendukung kebutuhan industri sekaligus mempercepat pengurangan beban sampah yang selama ini tertimbun.

Untuk jangka panjang, Pemkab Malang menargetkan seluruh TPA di wilayahnya dapat menerapkan teknologi serupa. "Ke depan, semua TPA yang ada di Kabupaten Malang akan menggunakan metode ini untuk menyelesaikan persoalan sampah," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem pemilahan sampah sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga. Dengan pemilahan yang baik, proses pengolahan di TPA dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. (Santi/Dya)

Belanja Pegawai Capai Rp1,18 Triliun, Sekda Kota Malang Ingatkan ASN soal Kinerja Maksimal

MALANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang agar meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik. Hal itu disampaikan menyusul tingginya porsi belanja pegawai dalam Rancangan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2026, yang mencapai Rp1,18 triliun.

Erik menegaskan, alokasi anggaran yang tinggi tidak boleh berbanding terbalik dengan kinerja ASN. "Jangan sampai porsi belanja yang besar seperti ini, tidak tercermin dalam kinerja pelayanan publik kita," ujar Erik dalam sambutannya pada Apel Pagi ASN Pemkot Malang, Senin (17/11/2025).

Untuk diketahui, berdasarkan dokumen nota keuangan Ranperda APBD 2026, total pendapatan daerah Kota Malang direncanakan mencapai Rp2,176 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp1,062 triliun.

Sementara itu, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,368 triliun sehingga terjadi defisit sekitar Rp192,1 miliar yang akan ditutup melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Struktur belanja tahun 2026 juga menunjukkan dominasi belanja operasi yang mencapai Rp2,244 triliun. Di dalamnya terdapat belanja pegawai yang menempati porsi terbesar, yakni senilai Rp1,180 triliun. Adapun belanja barang dan jasa mencapai Rp992,8 miliar. Di sisi lain, belanja modal tercatat hanya berkisar Rp101 miliar.

Melihat struktur belanja tersebut, Erik menyampaikan dua pekerjaan rumah utama bagi Pemkot Malang. Pertama, memastikan distribusi belanja pegawai dilakukan secara merata dan proporsional ke seluruh OPD sesuai kebutuhan masing-masing.

Kedua, memastikan seluruh ASN dapat mengoptimalkan kinerjanya agar selaras dengan besarnya beban

anggaran.

"Dengan porsi belanja pegawai yang besar seperti ini, PR kita yang pertama adalah harus terdistribusi merata dan proporsional ke semua OPD. Setelah itu, kedua, semuanya harus melaksanakan kinerjanya secara optimal atau bahkan maksimal," jelasnya.

Erik juga memberi pesan tegas terkait etos kerja ASN. Ia mengingatkan agar tidak ada pegawai yang menunjukkan sikap malas, merasa memiliki jabatan, atau enggan bekerja di luar rutinitas yang dianggap sebagai tupoksi semata. Menurutnya, ASN harus siap menjalankan tugas pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

"Jangan sampai belanja pegawai



Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, memimpin kegiatan apel pagi di Balai Kota Malang, Senin (17/11/2025). (Santi/Lentera)

yang besar membebani alokasi anggaran, tetapi justru tidak tercermin di dalam kinerja pelayanan publik yang harus dilakukan oleh seorang ASN seperti kita. Jangan menye-menye, sok-sokan, bossy," ujar Erik. (Santi/Dya)

WARGA PALESTINA TANPA DOKUMEN 'SERBU' AFSEL, INDONESIA TUJUAN BERIKUTNYA?

Sekitar 153 warga Palestina mendarat di Afsel tanpa dokumen resmi. Mereka ikut dalam penerbangan ini usai mendaftar ke sebuah lembaga nirlaba bernama Al-Majd Europe. Negara lain yang disebut menjadi tujuannya adalah Australia, Indonesia dan Malaysia. Israel dituduh menjadi dalangnya.

Sedikitnya 153 warga Palestina bak menyerbu Afrika Selatan (Afsel) karena mendarat tanpa dokumen yang jelas. Dikutip dari Al Jazeera, Senin (17/11/2025), mereka bahkan sempat tidak diizinkan turun dari pesawat selama 12 jam karena diminta untuk tetap berada di pesawat oleh polisi perbatasan.

Pesawat yang disewa membawa 153 warga Palestina itu mendarat di Bandara Internasional OR Tambo pada Kamis (13/11/2025) pagi waktu setempat. Mereka diminta untuk tetap berada di pesawat oleh polisi perbatasan karena tidak ada cap keberangkatan dari Israel di paspor mereka.

AFP dalam laporannya mengatakan pesawat itu adalah pesawat charter yang dioperasikan oleh maskapai Afrika, Global Airways, dan transit di Nairobi, Kenya.

"Mereka adalah orang dari Gaza yang secara misterius ditempatkan di pesawat yang melewati Nairobi dan tiba di sini," kata Presiden Afsel Cyril Ramaphosa kepada jurnalis.

"Kami pasti akan menyelidiki asal usul mereka, di mana awalnya, mengapa mereka dibawa ke sini. Karena mereka tidak memiliki dokumen apa pun," lanjutnya.

Ramaphosa melanjutkan meski 153 warga Palestina itu tetap diterima di Afsel atas dasar belas kasihan, dia curiga mereka diusir dari Jalur Gaza.

Salah satu warga Palestina yang ikut dalam penerbangan itu, Loay Abu Saif, mengaku tidak tahu tujuan penerbangan mereka. Dalam pengakuannya kepada Al Jazeera, Abu Saif mengatakan militer Israel memfasilitasi keberangkatan 153 warga Palestina itu lewat bandara Israel.

Abu Saif yang pergi bersama istri dan anaknya mengaku baru mengetahui pesawat akan menuju Johannesburg, Afsel, ketika akan melanjutkan perjalanan dari Nairobi.

Menurut pengakuan Abu Saif, istrinya mendaftarkan keluarganya ke sebuah lembaga nirlaba bernama Al-Majd Europe yang berkantor pusat di Jerman dan memiliki kantor di Yerusalem. Lembaga itu mengiklankan formulir pendaftaran di media sosial.

Abu Saif menduga Al-Majd Europe memilih keluarganya dalam perjalanan ini karena lembaga itu fokus pada keluarga yang memiliki anak dan membutuhkan dokumen perjalanan Palestina yang sah, serta izin keamanan dari Israel.

"Hanya ini yang saya tahu terkait



kriterianya," kata Abu Saif.

Soal apakah sejak awal dia tahu kapan akan meninggalkan Gaza, Abu Saif mengatakan tidak ada batas waktu yang diberikan lembaga itu. "Mereka bilang akan memberi tahu kami sehari sebelumnya. Itu yang terjadi," ungkapnya. Dia melanjutkan lembaga

itu meminta mereka untuk tidak membawa tas atau koper pribadi kecuali dokumen yang relevan.

Dari segi biaya, setiap orang dikenakan biaya sekitar USD 1.400 hingga 2.000 per orang (setara Rp 23 juta hingga Rp 33 juta). Orang tua membayar biaya yang sama per anak

atau bayi yang mereka bawa.

Setelah dipilih untuk berangkat, Abu Saif dan keluarganya dibawa oleh bus dari Rafah ke Karem Abu Salem di sepanjang perbatasan Israel. Mereka menjalani pemeriksaan di sana, kemudian dipindahkan menuju Bandara Ramon Israel.

Abu Saif mengatakan dokumen perjalanan tidak dicap oleh otoritas Israel. Dia mengira itu hanya prosedur rutin karena tidak ada petugas perbatasan Palestina di Gaza. (jaz,ist,gus/dya)

PERJALANAN EVAKUASI WARGA GAZA KE AFRIKA SELATAN

Pada 14 November, sebuah pesawat yang membawa 153 warga Palestina dari Gaza yang dilanda perang mendarat di Johannesburg, membuat pejabat Afrika Selatan merasa "tidak diberi informasi". Di balik penerbangan itu terdapat Al-Majd Europe, yang dituduh bekerja sama dengan otoritas Israel.

Rute Perjalanan



KETIBAAN

Setelah menunggu hampir 12 jam, rombongan akhirnya turun. 130 orang masuk Afrika Selatan, 23 lainnya melanjutkan ke negara tujuan lain.

Palestina Tuduh Israel Lakukan Perdagangan Manusia

OTORITAS Palestina menuduh Israel melakukan praktik "perdagangan manusia" terhadap warga Gaza, yang pekan lalu tiba secara misterius di bandara Afrika Selatan (Afsel). Otoritas Palestina mengatakan pihaknya sama sekali tidak mengetahui pengiriman warga Gaza ke Afsel tersebut.

Pada Jumat (14/11) lalu, pesawat yang mengangkut 153 warga Gaza mendarat di bandara OR Tambo di luar Johannesburg. Warga Gaza itu sempat tertahan selama 12 jam di dalam pesawat, karena tidak memiliki kelengkapan dokumen resmi untuk masuk ke Afsel. Pesawat carteran itu terbang dari Bandara Ramon di Israel ke Kenya, kemudian ke Afsel.

Otoritas Afsel awalnya menolak memberikan izin masuk karena mereka tidak dapat memberikan informasi mengenai durasi tinggal atau alamat akomodasi mereka. Paspor mereka juga tidak mendapatkan stempel keberangkatan dari bandara Israel -- syarat lazim dalam penerbangan.

Namun akhirnya, otoritas Afsel mengizinkan mereka turun dari

pesawat. Dari 153 warga Gaza itu, sebanyak 130 orang diproses untuk masuk ke negara itu dengan visa 90 hari. Sedangkan 23 orang lainnya melanjutkan penerbangan ke tujuan akhir mereka.

Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir The Jerusalem Post, Senin (17/11/2025), mengucapkan terima kasih ke pemerintah Afsel karena telah menerima "warga kami yang disesatkan".

Namun, Kementerian Luar Negeri Palestina juga melontarkan peringatan terhadap jaringan yang berupaya mengusir warga Palestina, terutama penduduk Gaza, dari rumah-rumah mereka demi kepentingan Israel.

"Memperingatkan perusahaan dan entitas yang menyesatkan rakyat kami, menghasut mereka untuk dideportasi atau dipindahkan, atau terlibat dalam perdagangan manusia, bahwa mereka akan menanggung konsekuensi hukum atas tindakan ilegal mereka dan akan dituntut dan dimintai pertanggungjawaban," tegas Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya.

"Kementerian mengimbau rakyat kami, terutama mereka yang berada di Jalur Gaza, untuk berhati-hati dan tidak menjadi korban perdagangan manusia, perdagangan darah, atau agen pengungsian paksa," imbuh pernyataan itu.

Otoritas Palestina, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya atau koordinasi dengan otoritas Afsel. (jaz,ist/dya)

DARK SHOWERING: TREN MANDI TANPA LAMPU YANG BIKIN NYENYAK TIDUR

Tren baru yang tengah mencuri perhatian di media sosial adalah dark showering, yakni mandi dalam kondisi minim cahaya atau sepenuhnya gelap. Meski tampak sederhana, kebiasaan ini dipercaya dapat membuat tubuh dan pikiran lebih tenang, sekaligus membantu meningkatkan kualitas tidur.

Dark showering pada dasarnya berarti mandi malam dengan lampu redup atau bahkan tanpa pencahayaan sama sekali. Tujuannya adalah menciptakan suasana tenang yang menandakan waktu istirahat bagi tubuh.

"Cahaya memiliki pengaruh kuat terhadap otak. Hal ini terjadi melalui jalur bernama retinohypothalamic tract, yang menghubungkan mata dengan jam biologis utama otak, disebut suprachiasmatic nucleus," jelas Dr. Daniel Amen, psikiater sekaligus pendiri Amen Clinics di California, kepada Fox News Digital.

Menurut Dr. Amen, cahaya terang, terutama cahaya biru dari gadget memberi sinyal pada tubuh untuk tetap terjaga dengan meningkatkan kadar kortisol dan menurunkan melatonin. Sebaliknya, suasana redup atau gelap mengirim pesan bahwa tubuh aman, memicu sistem saraf parasimpatis, dan membuat tubuh mulai masuk ke mode istirahat serta pemulihan.

"Bayangkan pencahayaan redup seperti menurunkan 'radar ancaman' di otak. Semakin sedikit stimulasi, semakin mudah bagi bagian otak yang logis untuk mengambil alih. Banyak orang kemudian merasa lebih tenang, jernih, dan seimbang," ujarnya.

Lebih lanjut, Dr. Amen menjelaskan bahwa berkurangnya stimulasi visual juga menurunkan

beban sensorik otak. "Artinya, bagian otak yang menangani rasa takut dan stres memiliki lebih sedikit hal untuk direspons," tambahnya.

Bagi yang penasaran ingin mencoba, Dr. Amen menyarankan untuk melakukannya secara bertahap. Mulailah dengan meredupkan lampu sekitar 60-90 menit sebelum tidur, atau gunakan cahaya lembut berwarna amber atau merah.

Saat mandi, hindari layar ponsel, matikan lampu, dan tambahkan elemen menenangkan seperti essential oil lavender, suhu ruangan sejuk (sekitar 18-20 derajat), serta handuk lembut. Ritual ini tak perlu lama, kurang 15 hingga 20 menit sudah cukup.

"Otak menyukai hal-hal yang bisa diprediksi. Rutinitas malam membantu kita berpindah dari kondisi siaga menuju ketenangan," kata Dr. Amen.

"Anda tidak perlu melakukan sesuatu untuk menenangkan otak. Anda hanya menciptakan lingkungan yang memungkinkan otak untuk menurunkan ritmenya sendiri," tegasnya lagi.

Dr. Amen menyebut dark showering dapat sangat menenangkan bagi orang dengan gangguan kecemasan, ADHD, atau insomnia. Namun, bagi sebagian orang, mandi dalam kegelapan bisa terasa tidak nyaman, terutama mereka yang

trauma dengan kegelapan. Dalam hal ini, ia menyarankan menambahkan pencahayaan lembut, musik pelan, atau aroma menenangkan agar terasa lebih aman.

Pagi Hari dengan Air Dingin

Bagi mereka yang tidak bisa mengganti rutinitas mandinya ke malam hari, mandi air dingin di pagi hari bisa menjadi alternatif yang efektif.

Menurut Dr. Amen, mandi dingin menstimulasi saraf vagus, membantu mengurangi peradangan, dan mengaktifkan bagian otak yang bisa menenangkan tubuh setelah stres.

"Mandi dingin di pagi hari dapat memberikan energi dan fokus. Namun, jika dilakukan malam hari, durasinya harus singkat dan sebaiknya diakhiri dengan air hangat agar tidak mengganggu kualitas tidur," katanya.

Kedua kebiasaan ini baik dark showering maupun cold shower sama-sama melibatkan stimulasi alami yang membantu otak menyesuaikan kondisi tubuh, apakah itu untuk bersiap memulai hari atau bersiap beristirahat.

Tren seperti dark showering menunjukkan bagaimana kebiasaan sederhana bisa berdampak besar bagi kesejahteraan mental dan fisik. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, memberi waktu bagi diri sendiri untuk mandi dalam ketenangan

mungkin adalah bentuk terapi yang paling mudah dilakukan di rumah. (wid,ist/dya)

10 LANGKAH AGAR TIDUR BERKUALITAS

1. Atur Jadwal Tidur
2. Mengurangi Tidur Siang
3. Perhatikan Makanan dan Minuman yang Dikonsumsi Sebelum Tidur
4. Jangan Makan Larut Malam
5. Olahraga Teratur
6. Batasi Menatap Layar Sebelum Tidur
7. Buat Lingkungan Tidur yang Nyaman
8. Mandi Air Hangat
9. Kelola Stress
10. Buat Rutinitas yang Menenangkan

AWAS, 4 PERANGKAT ELEKTRONIK INI BIKIN WIFI LEMOT

Banyak pengguna masih sering mengeluhkan koneksi WiFi di rumah tiba-tiba melambat, meski jaringan sudah menggunakan paket internet berkecepatan tinggi. Tanpa disadari, ada beberapa perangkat elektronik yang rutin dipakai sehari-hari namun justru menghabiskan bandwidth di belakang layar. Akibatnya, koneksi internet terasa tersendat tanpa sebab yang jelas..

Berikut empat jenis perangkat yang paling sering menjadi penyebab menurunnya performa WiFi, sebagaimana dikutip dari Pocket Lint.

PC Gaming dan Konsol

Perangkat seperti PC gaming, PlayStation, Xbox, dan Nintendo Switch kerap dianggap sebagai biang kerok koneksi lambat. Faktanya, permainan online sendiri tidak membutuhkan banyak data—Fortnite misalnya, hanya mengonsumsi sekitar 100 MB per jam.

Masalah utama muncul dari unduhan game berukuran besar serta pembaruan sistem operasi yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan gigabita. Konsol modern juga setara dengan komputer mini yang rutin memperbarui aplikasi, sistem, hingga konten tambahan.

Sebagian model bahkan berfungsi sebagai perangkat streaming.

Jika suatu konsol sedang memutar film 4K sambil mengunduh file besar di latar belakang, konsumsi bandwidth bisa melonjak drastis tanpa disadari.

Kamera Keamanan dan Bel Pintu Pintar

CCTV pintar dan video doorbell merupakan salah satu penyedot bandwidth terbesar di rumah. Perangkat ini merekam dan mengunggah video ke cloud selama 24 jam. Pada resolusi 1080p, satu kamera mungkin hanya membutuhkan sekitar 15 Mbps. Namun pada mode 4K, tiga kamera saja dapat menghabiskan hingga 75 Mbps secara terus-menerus. Beberapa model juga mengirim data

tambahan untuk fitur kecerdasan buatan, seperti pengenalan objek, identifikasi tamu, atau deteksi paket. Semakin tinggi tingkat keamanan yang diinginkan, semakin besar pula kapasitas internet yang terpakai.

Smart TV dan Perangkat Streaming

Menonton video lewat ponsel atau laptop tidak membebani jaringan terlalu besar. Namun ketika berpindah ke TV beresolusi 4K, kebutuhan bandwidth meningkat tajam.

Streaming 4K HDR idealnya memerlukan 25–50 Mbps, apalagi jika beberapa perangkat menonton secara bersamaan. Jika pada saat yang sama Anda mengunggah file besar, koneksi rumah bisa langsung tersendat.

Beberapa TV bahkan mendukung 8K, yang dapat menghabiskan lebih dari 100 Mbps. Banyak pakar menilai peningkatan kualitas visual pada 8K tidak sepadan dengan beban internet yang ditimbulkannya.

Laptop dan PC

Aktivitas ringan di laptop tidak memengaruhi jaringan secara signifikan. Namun masalah muncul saat perangkat melakukan unduhan besar, seperti pembaruan software, pemasangan aplikasi, atau pengunduhan film beresolusi 4K. Komputer biasanya akan menggunakan kecepatan maksimal yang tersedia, sehingga menyedot kapasitas internet rumah secara penuh.

Aplikasi berbagi file seperti BitTorrent juga menjadi ancaman besar bagi stabilitas jaringan. Jika fitur berbagi tidak dinonaktifkan, aplikasi dapat menghabiskan hampir seluruh

bandwidth untuk proses download maupun upload, bahkan ketika berjalan diam-diam di latar belakang. Hal ini tidak hanya memperlambat koneksi internet bagi pengguna lain, tetapi juga bisa memicu kepadatan jaringan yang berdampak pada keseluruhan sistem. Membatasi penggunaan

bandwidth atau menonaktifkan fitur berbagi file dapat membantu menjaga kestabilan koneksi. Selain itu, pengaturan prioritas jaringan dan penggunaan firewall atau QoS (Quality of Service) juga dapat digunakan untuk membatasi aktivitas berlebihan dari aplikasi peer-to-peer tanpa harus menonaktifkan internet sepenuhnya. (ist, wid/tin)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Blush On Natural dan Elegan Sesuai Usia

Sedikit blush di pipi akan membuat penampilan terlihat menarik dan menambah kepercayaan diri. Banyak orang beranggapan bahwa memilih warna blush on hanyalah soal selera. Padahal, ada seni tersendiri dalam menentukan warna yang tepat, terutama jika disesuaikan dengan usia. Blush on bukan sekadar memberi rona di pipi, melainkan juga mampu menghadirkan kesan segar, muda, dan natural yang sesuai dengan karakter wajah kita.

Seiring bertambahnya usia, kebutuhan kulit dan nuansa riasan pun ikut berubah. Warna yang terlihat cantik dan manis saat remaja bisa jadi kurang cocok ketika sudah memasuki usia 30-an atau 40-an. Begitu pula sebaliknya, warna yang memberi kesan elegan pada usia matang mungkin terlihat terlalu berat jika dipakai oleh anak muda. Karena itu, penting untuk mengenali warna blush on yang paling tepat agar riasan tidak hanya mempercantik, tapi juga memancarkan pesona sesuai umur.

Dengan pemilihan warna yang bijak, blush on bisa menjadi rahasia kecil untuk tampil lebih percaya diri. Entah itu untuk aktivitas sehari-hari, acara formal, atau sekadar ingin terlihat lebih segar tanpa makeup berlebihan, pemilihan warna blush on yang sesuai usia.

Usia 20-an

Di usia 20-an, kulit biasanya masih kenyal dan sehat sehingga pilihan warna blush on bisa lebih bebas. Warna-warna cerah seperti pink

muda, peach, atau coral sangat cocok untuk memberikan efek segar dan playful. Nuansa ini mampu menonjolkan sisi muda dan ceria tanpa terlihat berlebihan.

Selain itu, usia 20-an adalah waktu terbaik untuk bereksperimen. Tidak ada salahnya mencoba blush on dengan sedikit shimmer agar wajah terlihat glowing alami. Warna terang juga akan menambah kesan manis saat digunakan untuk aktivitas sehari-hari maupun acara santai bersama teman.

Usia 30-an

Memasuki usia 30-an, kulit mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dini seperti garis halus atau berkurangnya elastisitas. Karena itu, pilihan blush on sebaiknya lebih natural untuk memberi kesan anggun dan segar. Warna-warna seperti mauve, rose, atau peach nude bisa jadi pilihan tepat karena memberi rona lembut sekaligus menambah dimensi pada wajah.

Warna blush on yang lebih kalem juga membantu mengimbangi riasan keseluruhan, terutama jika sering digunakan untuk acara formal atau pekerjaan profesional. Tekstur matte biasanya lebih direkomendasikan, karena memberi hasil yang lebih rapi dan tahan lama. Namun, tetap bisa menambahkan sedikit satin finish untuk tampilan sehat bercahaya.

Usia 40-an

Pada usia 40-an ke atas, kulit cenderung kehilangan kecerahan alami dan bisa terlihat lebih kusam. Karena itu, memilih blush on yang tepat sangat penting agar wajah kembali terlihat

segar. Warna-warna hangat seperti soft rose, plum lembut, atau apricot sangat cocok untuk memberi efek alami sekaligus elegan.

Hindari warna yang terlalu terang atau terlalu neon karena justru bisa menonjolkan garis-garis halus di wajah. Tekstur creamy atau satin lebih dianjurkan karena mampu memberi kelembapan tambahan pada kulit yang mulai kering. Blush on dengan warna hangat ini juga dapat membantu menciptakan tampilan yang sehat dan awet muda tanpa terlihat berlebihan.

Blush on bukan hanya tentang menambahkan warna di pipi, tetapi juga soal menciptakan kesan yang sesuai dengan usia dan karakter wajah. Di usia 20-an, pilihlah warna cerah untuk menonjolkan keceriaan.

Memasuki 30-an, gunakan warna natural untuk tampil anggun. Sementara di usia 40-an ke atas, pilih warna hangat yang elegan untuk menjaga kesegaran wajah. Dengan pemilihan yang tepat, blush on bisa menjadi senjata rahasia agar selalu tampil menawan di setiap tahap kehidupan. (wid,fem,ist/dya)

Menentukan Sesuai Warna Kulit

Blush on dapat menjadi kunci tampilan wajah yang segar dengan rona alami. Namun, pemilihan warna yang kurang tepat justru bisa membuat wajah terlihat kusam atau terlalu mencolok. Karena itu, penting untuk memahami warna kulit dan undertone agar hasil riasan tampak natural dan menyatu dengan complexion.

Menurut GirlStyle, berikut panduan memilih warna blush on berdasarkan warna kulit dan undertone:

Kulit Cerah (Fair Skin)

Pada kulit terang, blush berwarna terlalu gelap mudah terlihat berlebihan. Pilih nuansa yang lembut agar hasilnya tampak lebih halus dan natural.

Cool undertone: Soft pink atau baby pink cocok untuk memberikan efek merona lembut, mirip semburat pipi saat tersipu.

Warm undertone: Peach atau coral bernuansa lembut membantu memberi kesan hangat dan cerah tanpa terlihat menor.

Kulit Medium

Pemilik kulit medium cenderung fleksibel dalam memilih warna blush. Hampir semua warna bisa masuk, asalkan tidak terlalu pucat atau terlalu gelap.

Fokusnya adalah memilih rona yang mampu menambah kesegaran tanpa membuat wajah tampak kusam.

Cool undertone: Rose pink, mauve lembut, atau pink keunguan bisa memberikan efek merona natural yang tetap halus.

Warm undertone: Coral, apricot, atau peach kecokelatan mampu mempertegas rona hangat alami kulit tanpa terlihat kontras berlebihan.

Kulit Sawo Matang / Tan Skin

Pada kulit tan, blush dengan pigmen yang sedikit lebih kuat justru tampak lebih menyatu. Warna terlalu pucat biasanya tidak memberikan efek apa pun karena kalah dengan intensitas warna kulit.

Cool undertone: Berry muda, plum ringan, atau rosy mauve membantu memberi kedalaman tanpa membuat tampilan terlalu berat.

Warm undertone: Terracotta, coral gelap, atau peach kecokelatan memberi sentuhan hangat yang menonjolkan kilau alami kulit tan.

Kulit Gelap (Deep/Dark Skin)

Kulit gelap membutuhkan warna blush yang kaya pigmen agar tetap terlihat. Pilihan warna yang terlalu lembut biasanya tidak muncul di permukaan kulit, sehingga cenderung tampak abu-abu atau pudar.

Cool undertone: Fuchsia, wine, atau berry pekat dapat memberikan semburat warna yang hidup dan proporsional. Warna-warna ini bekerja selaras dengan rona kulit dingin, sehingga menghasilkan tampilan yang segar, elegan, dan tetap seimbang tanpa terlihat terlalu mencolok.

Warm undertone: Brick red, tangerine, atau terracotta pekat memberikan tampilan hangat dan tegas, sekaligus menghindari efek kusam. Pilihan warna ini mampu menonjolkan kehangatan alami kulit dan menciptakan kesan lebih hidup serta bersinar.



Resah Hati Calon ...dari hal 1

Calon jamaah haji dari sejumlah daerah mengalami kegelisahan setelah muncul kebijakan baru dari Kementerian Haji dan Umrah terkait daftar tunggu haji. Mereka sudah melakukan banyak persiapan, mulai dari manasik haji, tes kesehatan, pengurusan paspor, bahkan hingga ada yang sudah membeli oleh-oleh.

Namun, setelah adanya kebijakan baru dari Kemenhaj, harapan mereka untuk berangkat haji pada 2026 pupus.

Di KBIH Miftahul Hidayah Cianjur, terdapat sekitar 200 calon jamaah yang sebelumnya telah menerima surat panggilan ibadah haji tahun 2026. Namun, setelah aturan baru diterapkan, hanya satu orang dari total 200 calon jamaah yang masuk dalam kuota terbaru.

Salah satu calon haji, Awaliah Saadah, mengungkapkan rasa sedihnya. Ia mengaku sudah mendaftarkan diri untuk berangkat haji dari tahun 2015. Awaliah juga mengaku sudah menjual mobil hingga tanah untuk modal pemberangkatan haji yang sebelumnya dikabarkan berangkat pada 2026.

"Saya daftar dari 2015 dan sudah mempersiapkan semuanya, termasuk menjual mobil dan tanah. Paspor dan biometrik juga sudah selesai. Melihat kondisi ini saya sangat sedih, berharap kebijakan ini tidak diberlakukan tahun ini," ungkapnya.

Calon jamaah lain, Yuyu Rusmanah, meminta pemerintah untuk tidak mengeluarkan aturan secara mendadak. "Kalau ada kebijakan baru, tolong jangan tiba-tiba. Kami seharusnya berangkat 2024 tapi ditunda menjadi 2026 karena Covid. Semua sudah kami persiapan," terangnya.

Saat ini terdapat 19 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIH) di Kabupaten Cianjur yang jamaahnya terdampak kebijakan baru tersebut. Mereka berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan dan mengembalikan kuota seperti semula, yakni sekitar 1.300 orang, agar mereka yang telah menunggu lama dapat berangkat sesuai estimasi jadwal awal.

Komnas Haji menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait kebijakan redistribusi kuota haji 2026. Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan bahwa kebijakan baru tersebut memang bertujuan menciptakan keadilan dan pemerataan, mengingat masa tunggu calon jamaah haji sudah sangat panjang, bahkan mencapai 47 tahun di beberapa daerah. Namun ia menegaskan bahwa metode yang digunakan pemerintah masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar.

Mustolih menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang menjadi dasar terbaru penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, memang memberikan kewenangan penuh untuk menetapkan kuota. Namun, ia menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur skema pemerataan masa tunggu menjadi 26 tahun secara seragam.

"Dalam kaitannya dengan kuota ini tidak ada satu pun, satu kata pun, satu kalimat pun dalam undang-undang ini untuk dibagi rata menjadi 26 tahun antriannya. Nah ini menjadi catatan tersendiri," kata Mustolih dikutip Senin (17/11/2025).

Ia menjelaskan undang-undang tersebut hanya mengatur pembagian kuota berdasarkan dua indikator utama, yakni proporsi penduduk muslim dan proporsi panjang antrean di setiap wilayah.

Komnas Haji juga mempertanyakan belum adanya regulasi turunan berupa peraturan menteri, peraturan dirjen, atau keputusan menteri yang secara resmi mengatur mekanisme pembagian kuota nasional.

"Pijakan aturan membagi kuota nasional itu belum kita temukan. Walaupun ada, kita tetap harus minta untuk dipublish," ujarnya.

Selain persoalan dasar hukum, Mustolih menilai kebijakan ini juga diterapkan tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat, khususnya calon jamaah haji.

"Yang terjadi hari ini adalah publik terkejut. Metode yang minim sosialisasi itu menimbulkan masyarakat menjadi resah dan gelisah," ucapnya.

Dampaknya pun terlihat di banyak daerah. Beberapa wilayah disebutkan "diuntungkan" dengan percepatan pemberangkatan, sementara banyak lainnya justru mengalami penundaan lebih panjang.

Sementara itu, Komnas Haji juga mencatat setidaknya 9.000 calon jamaah haji di Jawa Barat terdampak penurunan kuota. Bahkan wilayah Palopo, Sulawesi Selatan, dilaporkan tidak dapat memberangkatkan satu jamaah pun dalam skema baru ini.

Oleh karena itu, melihat berbagai dampak tersebut, Komnas Haji meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pembagian kuota yang baru.

Ia juga mendesak pemerintah untuk melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan di lapangan. "Perlu ada kajian ulang yang lebih komprehensif, detail dan menyeluruh terkait model pembagian kuota ini," tegasnya.

Soratan yang sama dikemukakan Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI). Akibat kebijakan ini, kuota haji dari sejumlah daerah, seperti Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, turun menjadi hanya 124 orang. Padahal, kuota haji untuk wilayah Kabupaten Sukabumi pada 2025 mencapai 1.535 orang.

"Akibat kebijakan ini, ribuan calon jamaah yang telah menunggu lebih dari satu dekade kini terancam nasibnya kembali tertunda keberangkatannya. Kebijakan ini juga mengancam mengubur harapan konsumen ke Tanah Suci," ujar Ketua YLKI Niti Emiliana dalam siaran pers yang diterima.

Menanggapi kebijakan ini, YLKI meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk menjelaskan kepada publik mengenai regulasi tersebut. Kebijakan ini juga perlu dievaluasi dari perspektif perlindungan konsumen dalam layanan publik keagamaan.

Menurut Niti, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penuh atas setiap perubahan kebijakan yang berdampak pada hak keberangkatan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah perlu menginformasikan secara masif dan terbuka formula pembagian kuota antarprovinsi dan kabupaten/kota.

"YLKI meminta pemerintah belajar dari kasus umrah yang belum ada satu dekade, ratusan ribu calon jamaah gagal berangkat ke Tanah Suci karena persoalan travel yang bermasalah," katanya.

Dari pengalaman YLKI mendampingi calon jamaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci, hal ini akan menyebabkan kerugian materil dan berdampak terhadap psikologis konsumen. Kasus kegagalan calon jamaah berangkat ke Tanah Suci ini tidak boleh terulang di kemudian hari.

Sebagai upaya ke depan, YLKI mendesak agar pemerintah membuka ruang dialog dengan calon jamaah haji yang berpotensi terdampak akibat kebijakan kuota haji tahun 2026. Pemerintah juga perlu menyiapkan skema pengaduan konsumen yang terdampak serta kompensasi yang adil bagi konsumen yang terancam akibat kebijakan ini.

Selain itu, YLKI juga merekomendasikan agar Kementerian Haji dan Umrah membentuk divisi perlindungan konsumen serta membuka hotline atau pusat pengaduan khusus bagi jamaah haji dan umrah yang gagal berangkat.

Mekanisme tersebut penting untuk memastikan adanya penanganan cepat terhadap keluhan konsumen dan pengawasan terhadap pelaku usaha travel. Di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi jaminan agar keberangkatan jamaah berlangsung tepat waktu, aman, dan selamat hingga tiba di Tanah Suci serta kembali ke Tanah Air.

Transparan dan Berkeadilan

Pemerintah menetapkan kuota haji Indonesia tahun 1447 Hijriah atau 2026 sebanyak 221.000 orang. Berdasarkan data pada aplikasi Nusuk Masar, kuota tersebut terdiri dari 203.320 anggota jamaah haji reguler (92 persen) dan 17.680 anggota jamaah haji khusus (8 persen).

Dalam penetapan kuota tahun 2026, untuk pertama kali pembagian kuota antarprovinsi dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan berbasis proporsi daftar tunggu jamaah haji. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa kementerian membagi kuota haji reguler ke dalam kuota provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah daftar tunggu haji di wilayah masing-masing. Pola baru ini dinilai paling adil dan transparan karena provinsi yang memiliki banyak pendaftar juga akan memperoleh kuota yang lebih besar.

Dengan mekanisme ini, pemerintah menilai masa tunggu calon jamaah antarprovinsi akan menjadi seragam sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekstrem antara daerah yang menunggu puluhan tahun dan daerah dengan antrean singkat.

Pola pembagian kuota berbasis daftar tunggu ini akan diterapkan sekurang-kurangnya selama tiga tahun ke depan dan akan diperbarui pada tahun keempat.

Selain itu, keadilan waktu tunggu ini juga berdampak langsung pada keadilan keuangan dalam konteks nilai manfaat. Sebab, semua calon jamaah akan memiliki peluang yang setara dalam mengakses dana manfaat setoran hajinya.

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pembagian kuota haji reguler 1447 H/2026 M antarprovinsi mengikuti prinsip keadilan dan proporsionalitas.

"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 mengatur secara tegas bahwa pembagian kuota haji reguler antarprovinsi harus mencerminkan keadilan dan proporsionalitas," kata Menhaj Irfan Yusuf di Jakarta, Senin (17/11/2025), dalam rilis yang diterima.

Ia menyebut Pasal 13 ayat (2) memberikan tiga pendekatan pembagian kuota yang dapat digunakan pemerintah. Pendekatan pertama didasarkan pada proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antarprovinsi. Pendekatan kedua menggunakan proporsi jumlah penduduk muslim. Pendekatan ketiga berupa kombinasi keduanya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Haji dan Umrah. (gus,ist,sua,kcm/dya)



APBD JAWA TIMUR 2026 DISAHKAN, DPRD BERI CATATAN KRITIS

Soroti Penurunan Pendapatan, Kemandirian Fiskaldan Efisiensi Belanja

SURABAYA — DPRD Jawa Timur (Jatim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Seluruh fraksi menyatakan persetujuannya, namun ada beberapa catatan kritis dan strategis. Mulai dari menyoroti penurunan pendapatan daerah, pelemahan kapasitas fiskal, perlunya reformasi BUMD, serta pentingnya penguatan kemandirian ekonomi daerah.

Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menegaskan semua pandangan akhir fraksi menjadi dasar penting bagi penyempurnaan kebijakan anggaran 2026.

“Semua saran, masukan, dan harapan fraksi-fraksi yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dalam pendapat akhir fraksi agar segera ditindaklanjuti. Kesimpulan ini menjadi dasar dan akan dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026,” ungkap Politisi PKB tersebut, dikutip Senin (17/11/2025).

Diketahui, penandatanganan persetujuan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jatim bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sabtu (15/11/2025) lalu.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa APBD 2026 tidak boleh menjadi dokumen teknokratis semata, melainkan instrumen politik keberpihakan kepada rakyat kecil. Juru bicara fraksi, Y Ristu Nugroho, menyebutkan bahwa penyusunan anggaran tahun 2026 berlangsung dalam situasi fiskal tidak menentu dan ruang fiskal yang semakin sempit. Karena itu, PDIP menilai anggaran harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat, menekan kemiskinan, memperluas lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Fraksi PDIP memberi perhatian khusus pada penurunan pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp26,30 triliun. Jumlah itu turun Rp1,96 triliun dari usulan awal dan merosot Rp9,17 triliun dibanding realisasi 2024.

“Ini sinyal serius bagi keberlanjutan fiskal Jatim. Tingginya ketergantungan pada pusat



Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menandatangani kesepakatan bersama Raperda APBD 2026.
(Foto-foto:dok.HumasDPRDJatim)

menunjukkan lemahnya kemandirian daerah,” ujar Ristu.

Pertumbuhan PAD yang hanya meningkat 2 persen dinilai jauh dari potensi Jawa Timur. Di sisi lain, kinerja BUMD dianggap stagnan, beban operasional naik, dan kontribusi dividen minim. PDIP mendesak evaluasi menyeluruh BUMD, penyusunan master plan bisnis, serta penguatan profesionalisme dan transparansi.

Dalam struktur PAD, 76 persen masih bergantung pada pajak daerah, terutama PKB dan BBNKB yang dinilai membebani masyarakat kecil. Karena itu, Fraksi PDIP mendorong reformasi pajak progresif, insentif bagi UMKM dan petani, serta perluasan basis pajak pada sektor energi terbarukan dan ekonomi digital.

PDIP juga menyoroti komposisi belanja 2026 sebesar Rp27,22 triliun, di mana belanja modal hanya 5 persen, sedangkan belanja operasi mencapai 75 persen. Defisit Rp916,73 miliar yang ditutup dari SiLPA juga menjadi perhatian.

“Dalam semangat Trisakti Bung Karno, kemandirian fiskal hanya bisa dibangun melalui keberanian memperkuat produktivitas rakyat,” tegas Ristu.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menyatakan persetujuannya namun memberikan catatan kritis terutama terkait penurunan pendapatan daerah 6,94 persen atau Rp1,96 triliun. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Budiono, mengatakan bahwa meskipun pendapatan menurun, pemerintah provinsi dinilai masih menjaga target pembangunan melalui optimalisasi

PAD yang kini menyumbang 66 persen dari total pendapatan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) disebut menjadi sumber utama PAD. Gerindra menegaskan bahwa digitalisasi pelaporan dan pengawasan pajak harus segera diperkuat guna menekan kebocoran pendapatan.

Catatan lain Gerindra adalah turunnya Transfer ke Daerah (TkD) sebesar Rp2,8 triliun atau 24 persen.

“Penurunan TKD ini tidak bisa dianggap enteng. Provinsi harus segera menyesuaikan strategi agar tidak terjadi perlambatan program yang menyentuh masyarakat,” tegas Budiono.

Gerindra juga meminta BPKAD lebih agresif memaksimalkan pemanfaatan aset daerah dan mendorong kerja sama dengan pihak ketiga untuk aset idle. Sementara untuk BUMD, fraksi menekankan renegosiasi kontrak, perbaikan tata kelola, dan pemanfaatan aset produktif.

Di sektor belanja, Gerindra mengingatkan agar infrastruktur tetap menjadi prioritas, sebab belanja modal yang menurun berpotensi menghambat pelayanan publik.

“Perbaikan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan harus dijaga agar tidak mengganggu pelayanan publik,” paparnya.

Fraksi PKB juga menyetujui APBD 2026, namun dengan rangkaian catatan terkait kondisi fiskal daerah. Juru bicara fraksi, Ibnu Alfandy Yusuf, menegaskan keprihatinan mendalam atas menurunnya pendapatan daerah sebesar Rp2,8 triliun dibanding APBD 2025.

“Penurunan sebesar ini menunjukkan melemahnya kapasitas fiskal daerah, yang pada akhirnya berimplikasi pada kemampuan penyediaan layanan publik,” tegasnya.

PKB juga menyebut bahwa meski PAD kini menjadi sumber pendapatan dominan dengan kontribusi 66 persen, pertumbuhannya sangat stagnan. Proyeksi pertumbuhan PAD hanya 2 persen, sementara PAD justru mengalami kontraksi Rp5,9 triliun atau turun 26 persen dibanding realisasi 2024.

“Ini sinyal kuat bahwa reformasi fiskal belum berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

PKB meminta Pemprov memperkuat strategi pengelolaan pendapatan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan pengawasan, serta memanfaatkan teknologi untuk menekan potensi kebocoran. Selain itu, sektor-sektor yang mengalami penurunan drastis perlu mendapat perhatian khusus. (pra,adv/dya)

